

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

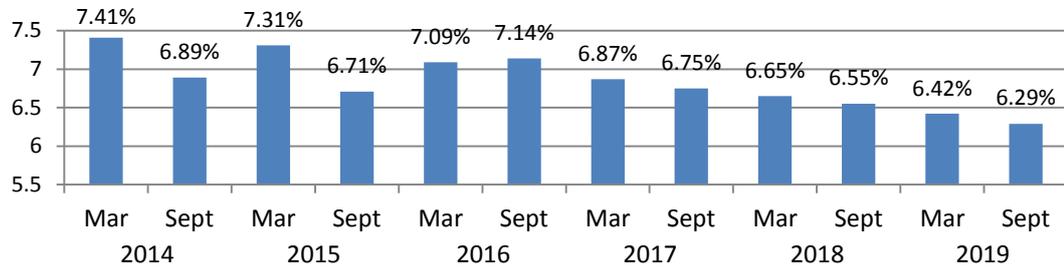
Pembangunan menjadi hal terpenting bagi negara. Suatu negara dikatakan maju apabila pembangunan di negara tersebut mengalami peningkatan. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari semakin menurunnya angka kemiskinan di negara tersebut. Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan utama pada negara berkembang di dunia termasuk Indonesia dikarenakan kemiskinan menjadi patokan bagi tingkat kesejahteraan penduduk. Selain itu, kemiskinan juga bersifat kompleks dan menjadi masalah multidimensi. Hidup miskin tidak hanya berarti kekurangan uang dan pendapatan yang rendah, namun kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan dalam mencapai akses dalam bidang sosial, budaya, partisipasi dalam masyarakat, serta berbagai bidang lainnya.

Menurut Todaro (2000: 201), pada negara berkembang kemiskinan didominasi oleh kaum perempuan. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2017, persentase penduduk berjenis kelamin laki-laki yang berada di bawah garis kemiskinan adalah sebesar 10,39% sedangkan penduduk perempuan sebesar 10,89%. Angka kemiskinan ini mengalami penurunan pada tahun 2018 sehingga penduduk miskin laki-laki memiliki persentase sebesar 9,59% sedangkan penduduk perempuan masih mendominasi yaitu sebesar 10,06% (BPS, 2019).

Memiliki banyak provinsi, pemerintah Indonesia terus menerus berupaya menekan angka kemiskinan di masing-masing provinsi, salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Barat. Jika dilihat dari segi budaya, Sumatera Barat sebagai daerah yang menganut sistem kekerabatan matrilineal terbesar di dunia memiliki peluang yang cukup besar dalam melibatkan perempuan dalam pengentasan kemiskinan yang didominasi oleh kaum perempuan ini.

GAMBAR 1.1

Persentase Penduduk Miskin Sumatera Barat, Maret 2014 – September 2019



Sumber : Sumatera Barat dalam Angka (berbagai tahun penerbitan)

Menurut data BPS Sumatera Barat, pada Maret 2016, angka kemiskinan di Sumatera Barat meningkat dari 6,71% menjadi 7,09% dan pada bulan September meningkat kembali menjadi 7,14%. Jumlah penduduk miskin menurun pada Maret 2017 hingga September 2019, dengan besar penurunan berturut-turut yaitu sebesar 0,12%, 0,1%, dan 0,13%. Meskipun data di atas menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin selama tiga tahun terakhir, akan tetapi penurunan kemiskinan cenderung melambat dibanding beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, dari Maret ke September, kemiskinan mampu menurun sebesar 0,52% dan di tahun 2015 bahkan menurun sebesar 0,6%.

BPS (2016) mengungkapkan, peningkatan kemiskinan yang cukup besar pada September 2015 ke Maret 2016 disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama yaitu banyaknya bencana alam yang terjadi di awal tahun 2016 sehingga menyebabkan sektor pertanian dan perkebunan bergejolak, yang kedua yaitu adanya urbanisasi, dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan upah. Selain itu, kenaikan harga BBM juga menjadi penyebab peningkatan kemiskinan di Sumbar. Menurut BPS (2019), penyebab kemiskinan di Sumatera Barat didominasi oleh pengeluaran makanan sebesar 75,91% dan non makanan sebesar 24,09%.

Membahas kemiskinan, isu gender merupakan salah satu hal yg berkaitan dengan kemiskinan (Putri & Fakhrudin, 2016). Dalam kemiskinan, pengalaman perempuan dan laki-laki berbeda sehingga dampak yang ditimbulkan akibat kemiskinan ini pun juga akan berbeda. Hampir segala

bidang pembangunan masih belum berpihak pada perempuan dikarenakan laki-laki lebih memiliki peluang dan kekuatan dalam ekonomi, sosial, dan politik (*Women Research Institute*, 2006). Selain itu, permasalahan kemiskinan perempuan ini disebabkan oleh ideologi patriarki yang masih melekat erat dalam masyarakat sehingga menimbulkan pembatasan terhadap peran perempuan (Arjani, 2007).

Menurut *Women Research Institute* (2006: 24), dalam mengkaji kemiskinan berbasis gender terdapat beberapa aspek yang berhubungan dengan kemiskinan perempuan, diantaranya yaitu akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, upah yang sama, dan politik.

Dalam bidang pendidikan, salah satu ukuran pencapaian yang perlu diperhatikan yaitu rata-rata lama sekolah. Berdasarkan data BPS Sumbar, rata-rata pendidikan yang dijalani laki-laki di Sumatera Barat pada tahun 2018 sekitar 8,87 tahun sedangkan perempuan yaitu 8,66 tahun. Menurut Meutia, kesenjangan pendidikan ini disebabkan oleh munculnya pemikiran bahwa menyekolahkan anak perempuan ke jenjang yang lebih tinggi adalah hal yang sia-sia karena pada saat dewasa, anak tersebut pada akhirnya akan mengurus urusan rumah tangga saja. Padahal pendidikan bagi seorang perempuan sangatlah penting untuk mendidik anak-anak mereka nantinya (Natasha, 2013).

Pada aspek kesehatan, salah satu indikator yang menjadi acuan untuk melihat bagaimana perempuan mendapatkan pelayanan kesehatan yaitu Angka Kematian Ibu (AKI). Persentase kematian ibu di Sumatera Barat dari tahun 2015 sampai 2018 secara berturut-turut yaitu 0,09 persen, 0,10 persen, 0,11 persen, dan 0,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Sumbar terdapat peningkatan kematian ibu sebesar 0,01 persen di tiap tahunnya.

Selanjutnya, dalam bidang ekonomi masih terdapat ketimpangan capaian antara laki-laki dan perempuan, yaitu dalam penerimaan upah di Sumatera Barat. Di tahun 2018, rata-rata upah yang diperoleh oleh buruh atau karyawan perempuan yaitu Rp 2.398.862 sedangkan laki-laki Rp 2.740.083. Menurut Khotimah (2009), pada kalangan pengusaha terdapat kecenderungan untuk mempekerjakan perempuan pada jenis pekerjaan atau sektor tertentu

dikarenakan upah yang didapat perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Suatu penelitian mengenai buruh perempuan pada industri sepatu di Tangerang menunjukkan, bahwa biaya tenaga kerja (upah buruh) laki-laki yaitu 10-15% dari total biaya produksi sedangkan biaya tenaga kerja perempuan dapat ditekan hingga 5-8%. Padahal, dalam kasus ini persentase buruh perempuan pada industri tersebut adalah 90% dari total buruh. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa pemisahan hak dan peran atas dasar jenis kelamin masih terjadi bahkan pada sektor pekerjaan formal.

Persoalan pembangunan lain yang belum berpihak pada perempuan yaitu dalam aspek politik, anggota parlemen di Sumatera Barat juga masih didominasi oleh laki-laki. Pada tahun 2018 saja, persentase anggota laki-laki di DPRD Sumatera Barat sebesar 91,69% sedangkan perempuan hanya sebesar 8,31% (BPS Sumbar, 2019). Timpangnya komposisi anggota parlemen legislatif ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam politik masih sangat besar. Selain itu jika dibandingkan, keterwakilan perempuan di parlemen Sumatera Barat dan Nasional juga menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Pada tahun 2018, keterwakilan perempuan di parlemen Sumatera Barat sebesar 10,77% sedangkan keterwakilan nasional sebesar 17,32% (BPS, 2019). Akan tetapi, hal yang perlu diteliti lebih jauh adalah apakah keterwakilan perempuan dalam parlemen di Sumatera Barat memiliki pengaruh yang signifikan dengan dibuatnya kebijakan yang memperjuangkan kesetaraan gender.

Dari uraian penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa akses serta capaian yang dimiliki oleh perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam berbagai bidang yang ada di Sumatera Barat. Padahal jika dilihat dari segi sosial budaya, keistimewaan dan kedudukan yang dimiliki perempuan di Sumatera Barat menjadikan perempuan memiliki peluang yang cukup besar untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan. Keterlibatan perempuan juga tidak bisa diabaikan begitu saja karena perempuan juga memiliki potensi untuk ambil bagian secara aktif dalam berbagai program pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan agenda pembangunan lanjutan dari MDG's yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan dan diagendakan dapat tercapai dalam jangka periode 2015 sampai 2030. Diantara tujuh belas butir tujuan SDG's, target pertama yang ingin dicapai yaitu tidak ada lagi kemiskinan dalam masyarakat. Hal ini dapat diartikan, bahwa pada tahun 2030, angka kemiskinan di masyarakat adalah 0%.



GAMBAR 1.2

Persentase *Forecasting* Penduduk Miskin Sumatera Barat Tahun 2020-2030



Sumber : Hasil Olahan

Dengan menggunakan metode *forecasting* (peramalan), didapat persentase penduduk miskin di Sumatera Barat hingga 11 tahun ke depan. Angka kemiskinan di Sumatera Barat diperkirakan akan terus menurun hingga sebesar 3,98% di tahun 2030. Jika disimpulkan, masih terdapat penduduk miskin di Sumatera Barat pada tahun 2030 yang berarti tujuan SDG's masih belum dapat tercapai. Berbagai strategi dan kebijakan harus bisa mendorong agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik, salah satunya yaitu dengan mengikutsertakan perempuan dalam pengentasan kemiskinan.

Jika kaum perempuan tidak menjadi target tujuan dari pengentasan kemiskinan serta analisis gender tidak digunakan untuk menganalisis akar penyebab dari kemiskinan, maka kebijakan dan program yang diupayakan untuk mengentaskan kemiskinan tidak akan dapat menjangkau perempuan

yang memiliki akses terbatas dalam ruang publik (*Women Research Institute*, 2006: 3).

Dari uraian penjelasan di atas, maka permasalahan yang menjadi dasar dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendidikan perempuan terhadap kemiskinan di Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh kesehatan perempuan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh upah yang diterima perempuan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengaruh keterwakilan perempuan di parlemen terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pendidikan perempuan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat
2. Menganalisis pengaruh kesehatan perempuan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat
3. Menganalisis pengaruh upah yang diterima perempuan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat
4. Menganalisis pengaruh keterwakilan perempuan di parlemen terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat